

TRAGEDI “BONSAI POLRI”

Oleh Djoko Subagio *)

Masyarakat sudah mengetahui dan mengenal yang namanya bonsai adalah tanaman keras yang pada umumnya jenis tanaman langka yang dikerdilkan sebagai daya kreasi seni untuk mendapatkan keindahan, seperti: bonsai beringin biasa, bonsai beringin putih, bonsai sawo kecil, dan lain-lain. Tanaman keras dan langka yang seharusnya bisa tumbuh besar dan mampu dimanfaatkan untuk berlindung dan berteduh oleh siapa saja tersebut apabila sudah dikerdilkan dengan proses pemangkasan akar dan ranting secara sistematis dan terus-menerus, maka fungsinya sebagai tempat berteduh dan berlindung akan hilang. Bonsai tersebut akan hidup sebagai hiasan dengan kekerdilannya yang hanya bisa memberikan kepuasan kepada pemilik atau penggemarnya saja. Demikianlah ilustrasi pengertian bonsai yang sebenarnya.

Bagaimana dengan pengertian “Bonsai Polri” dalam arti kiasan maupun sesungguhnya? Kalau kita memahami pengertian bonsai yang intinya adalah pohon yang dikerdilkan, maka pengertian “Bonsai Polri” tidaklah jauh berbeda, yaitu “Polri yang kerdil, dikerdilkan, atau mengkerdilkan diri”. Tentunya akan banyak pertanyaan dengan adanya istilah yang tidak lazim ini, dan untuk itu marilah kita simak secara mendalam mengapa Polri kita menjadi “bonsai”.

Dalam usianya yang sudah mencapai setengah abad lebih ini, Polri seharusnya sudah merupakan institusi yang besar dan valid ditinjau dari segala aspek terutama organisasi, manajemen, operasionalisasi, maupun profesionalismenya. Namun dalam kenyataannya nama Polri belum pernah besar dan belum pernah sempurna sesuai dengan harapan masyarakat yang senantiasa mendambakan pengabdian terbaiknya. Sejak Republik ini berdiri belum pernah ada tinta emas Polri yang menghiasi sejarah kehidupan bangsa. Sejarah emas Polri hanya dikenal di lingkungan institusi Polri sendiri dan tidak dikenal masyarakat sama sekali. Yang dikenal masyarakat justru hanya perilaku-perilaku negatif sebagai oknum Polri saja yang notabene juga membawa nama Polri secara keseluruhan. Lebih-lebih di era reformasi ini, persentase perilaku negatif tersebut sangat tidak jelas baik menurut versi masyarakat awam, cendekiawan, maupun pimpinan Polri sendiri. Di kalangan masyarakat awam dan cendekiawan, penelitian terhadap perilaku negatif ini pada umumnya memiliki komitmen yang sama, yaitu dilakukan oleh mayoritas anggota Polri mulai dari level bawah sampai atas. Sedangkan pimpinan Polri secara umum memberikan penilaian dengan makna yang “tidak sama tapi serupa”. Menurut Jendral Koenarto, perilaku Polri tersebut ibaratnya “susu setitik di antara nila sebelanga”. Sementara almarhum Anton Soedjarwo

*) Penulis adalah Sesdit Lantas Polda Sumbar.

karena masing-masing partai politik saling unjuk kekuatan. Di antara beberapa partai politik tersebut yang tampak paling menonjol dan semakin lama semakin kuat adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai ini dalam penampilannya tampak agresif dan penuh percaya diri ketika konsep "Nasakom"-nya mendapat dukungan dari Presiden Soekarno dan para pengikutnya yang "progresif revolusioner". Satu-satunya kekuatan politik yang secara terus terang tidak setuju dengan gagasan Presiden untuk mendukung PKI dengan doktrin Nasakomnya adalah Jenderal AH Nasution dengan Angkatan Daratnya. Alasannya secara garis besar simpel saja, yaitu di samping doktrin Nasakom tersebut dianggap sebagai kedok politik yang memiliki tujuan tertentu, PKI di mata Angkatan Darat adalah sosok partai yang sejarahnya tidak pernah berjasa pada negara dan bahkan kondisinya dianggap sangat jelek karena sering berontak yang klimaksnya adalah peristiwa "Madiun Affair" pada tahun 1948. Perselisihan antara Soekarno dan Nasution ini sudah bukan rahasia lagi di kalangan elit politik dan berdampak akan adanya dua kubu kekuatan yang saling bertentangan dan menimbulkan adanya suasana "api dalam sekam" di semua lini institusi, karena masing-masing tidak tahu siapa kawan siapa lawan.

Kedua, suasana "api dalam sekam" akibat konflik elit politik yang melanda institusi Kepolisian Negara, di antaranya terdapat sejumlah perwira muda Kepolisian yang tersedot masuk dalam pusaran suasana "revolusioner" pada masa itu. Pimpinan Polri RS Soekanto

segera tanggap terhadap gejala yang kurang baik terhadap perkembangan kepolisian ini dan segera mengambil sikap untuk menyelamatkan "profesionalisme kepolisian" dari pengaruh kotor permainan elit politik tersebut. Langkah yang diambil adalah segera mengadakan Konferensi Dinas Kepolisian Negara yang dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Oktober 1959 sebagai upaya untuk penyesuaian Kepolisian terhadap berlakunya kembali UUD 1945 dan menyikapi setiap ritme ide-ide Presiden Soekarno khususnya pembentukan ABRI yang memasukkan Kepolisian Negara sebagai salah satu unsurnya. Konferensi Dinas yang menghasilkan Manifesto Kepolisian tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh generasi muda Kepolisian dengan membentuk "Tim Sepuluh" yang rekomendasinya mengenai pergantian personalia ditolak oleh RS Soekanto. Penolakan tersebut menimbulkan konflik di lingkungan Kepolisian yang muncul ke permukaan pada tanggal 29 November 1959, yaitu ketika sejumlah perwira di Kepolisian Negara Komisariat Jakarta mengultimatum RS Soekanto untuk menerima hasil Tim Sepuluh, atau tangan Presiden akan dipakai. Konflik semakin memanas saat RS Soekanto tetap bersikukuh dengan pendiriannya dan Tim Sepuluh benar-benar melaksanakan ultimatumnya dengan melaporkan konflik intern kepolisian tersebut kepada Presiden Soekarno. Bagi Soekarno hal itu ibarat "pucuk dicinta ulam tiba". RS Soekanto yang dianggapnya tidak revolusioner karena penolakan atas gagasannya membentuk ABRI, merupakan

momentum yang tepat bagi Soekarno untuk membuat perhitungan dengan RS Soekanto. Pada tanggal 13 Desember 1959 RS Soekanto dipanggil ke Istana untuk diperingatkan agar tidak memberikan sanksi kepada para perwira penentanginya, namun peringatan itu tidak digubrisnya. Para perwira yang dianggap tidak loyal tersebut tetap diberikan sanksi skorsing dan ini membuat Presiden Soekarno marah. Sebagai akibatnya pada tanggal 15 Desember 1959 RS Soekanto diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Kepolisian Negara (KKN) dan digantikan oleh Soekarno Djojonegoro. Sejak saat itu benteng pertahanan Kepolisian Negara untuk bisa bebas dari pengaruh politisasi dan revolusionerisasi runtuh dan terseretlah Polisi dalam kancah arus politik selanjutnya.

Ketiga, dengan runtuhnya benteng Kepolisian Negara yang dipertahankan oleh kubu RS Soekanto, seakan-akan telah memperkuat posisi Presiden Soekarno dalam berhadapan dengan Nasution bersama Angkatan Daratnya. Diangkatnya Kepala Kepolisian Negara Soekarno Djojonegoro yang dianggap revolusioner tersebut merupakan tambahan darah segar bagi tujuan politik Soekarno. Sementara itu dengan diberhENTIKANNYA RS Soekanto dari jabatan Kepala Kepolisian Negara, bukan berarti konflik intern kepolisian sudah selesai. Perselisihan dalam bentuk perang urat syaraf antara yang pro dan kontra terhadap kebijaksanaan Presiden Soekarno terus saja berkecamuk, sehingga dalam kurun waktu kurang dari lima tahun telah terjadi pergantian pimpinan Kepolisian sampai tiga kali, yaitu :

Soekarno Djojonegoro, Soetjipto Danoe-koesoemo, dan Soetjipto Joedodihardjo, sampai akhirnya meletus peristiwa G 30 S/ PKI sebagai puncak konflik elit politik antara Presiden Soekarno dengan Angkatan Darat pada tahun 1965, pergolakan dalam tubuh kepolisian yang tidak kunjung selesai tersebut seakan-akan terhenti. Meskipun menurut penilaian pengamat Militer Dr. Salim Said yang menyatakan, bahwa pergolakan intern Kepolisian tersebut telah menyelamatkan Polri dari sepenuhnya menjadi pendukung politik dan alat presiden Soekarno, namun juga bukan berarti Polri sepenuhnya bersih dari percikan noda politik tersebut yang kemudian pemerintahan Soekarno dengan dinamika politiknya dikenal dengan sebutan "Orde Lama". Bersama dengan Angkatan lain, nama Polri ikut terbawa-bawa karena memang terbukti ada yang terlibat.

Keempat, tertumpasnya G 30 S/PKI mencerminkan runtuhnya pemerintahan Orde Lama dan menurunnya pamor Soekarno pada waktu itu. Dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dikenal dengan sebutan Supersemar, maka lahirlah "Orde Baru" yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Lahirnya pemerintahan Orde Baru yang menaikkan pamor Jenderal Soeharto tersebut pada awalnya merupakan tumpuan harapan besar bagi perkembangan Kepolisian Negara untuk menjadi baik dan besar. Namun tampaknya harapan tinggal harapan. Fakta yang dialami Polri, justru di era inilah perkembangan citranya semakin lama semakin merosot, karena pemerintah Orde

Baru tidak pernah menjadikan Polri untuk mandiri dan otonom sepenuhnya, melainkan Polri malah semakin diikat dalam institusi ABRI yang kedudukannya berada di bawah Menhankam/Pangab. Konotasinya sebagai "alat penguasa" sebagaimana pernah dialami pada era Orde Lama yang membawa citranya turun, malah diperkuat dan dijadikan bumper terdepan dalam menghadapi setiap masalah yang timbul di masyarakat.

Sengaja Dikerdilkan.

Barangkali, adanya trauma politik yang dialami oleh pemerintah Orde Baru setelah meletusnya peristiwa G 30 S/PKI merupakan penyebab adanya pembatasan-pembatasan dan pengurangan-pengurangan kewenangan Polri baik ditinjau dari aspek operasional maupun administrasi, sehingga menjadikan Polri semakin kerdil saja. Hal ini sesuai dengan komitmen Dr. Salim Said yang menanggapi pendapat Dr. Awaloedin Djamin mengenai makna "integrasi yang berlebihan", *bahwa kalau kita mempelajari dengan seksama tingkah laku politik rezim Orde Baru, maka perlakuan terhadap Polri, barangkali juga TNI AL dan TNI AU menurut saya tidak mudah dipisahkan dari trauma politik yang diderita TNI AD yang menjadi korban utama G30 S/PKI.* Selanjutnya dalam tanggapan tersebut lebih diperjelas lagi mengenai penyebab adanya pembatasan dan pengurangan kewenangan Polri, sebagaimana pernyataannya; *bahwa dalam hal ini tidak sulit untuk dimengerti jika TNI AD yang merupakan partner senior dalam ABRI tidak ingin menanggung resiko dengan*

cara memberi kebebasan kepada kekuatan lainnya terutama dua angkatan dan Polri. Dengan adanya komitmen yang demikian dari seorang tokoh ilmuwan politik, maka unsur kesengajaan terhadap pengkerdilan Polri memang ada dan hal ini didukung dengan fakta-fakta, antara lain :

Pertama, sebagai salah satu unsur ABRI yang berada di bawah Dephankam/Mabes ABRI otomatis Polri sudah tidak otonom lagi. Segala kebijaksanaan yang menyangkut masalah administrasi pembinaan dan operasionalisasi tidak bisa diputuskan sendiri, melainkan semuanya tergantung kepada Dephankam/Mabes ABRI yang notabene tidak memahami sama sekali terhadap profesionalisme Polri. Mengenai kedudukan Polri dalam struktur organisasi ABRI ini, terdapat dua masalah prinsip yang merupakan kendala dan menjadikan Polri menderita sepanjang masa, yaitu: status "Polri yang bukan Angkatan Perang" dan posisi "Polri sebagai partner yang paling junior". Dengan status Polri yang bukan Angkatan Perang, setiap program Dephankam selalu lebih mengedepankan aspek pertahanan yang dominasinya ada di Angkatan Perang, dari-pada aspek keamanan yang dominasinya ada di pemerintahan sipil. Sementara itu posisi Polri sebagai partner yang paling junior di lingkungan ABRI senantiasa tidak pernah mendapatkan porsi yang "prioritas" meskipun itu porsinya sendiri, karena prioritas dalam segala hal selalu diperuntukkan bagi partner senior, yaitu Angkatan Perang. Sebagai contoh, pada saat Pemerintahan Orde Baru melalui kerja sama internasionalnya di bidang pertahanan

dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional, Polri tidak pernah dilibatkan karena statusnya bukan Angkatan Perang. Demikian pula saat kerja sama internasional di bidang kesejahteraan, Polri juga tidak mendapatkan porsi karena status Polri bukan sipil.

Kedua, kekuatan Polri secara kualitas dan kuantitas terus dikurangi baik dari aspek organisasi, personil, saran, maupun prasarannya. Sejak pemerintahan Orde Baru mulai normal dan memulai pembangunan dengan program Repelitanya, organisasi ABRI mulai dibenahi yang membawa konsekuensi berubahnya pula organisasi Polri secara total mulai dari tingkat Mabes sampai Polsek sebagai ujung tombak terdepan. Banyak fungsi-fungsi yang merupakan kekuatan Polri dihilangkan, ditiadakan, dan disederhanakan, seperti: pembubaran Resimen Pelopor yang eksistensi dan perannya di era kepemimpinan Soekarno sangat membanggakan; peniutan Satuan Brimob dari Batalyon menjadi Kompi; penyederhanaan struktur organisasi mulai dari tingkat Mabes sampai Polsek; dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kebutuhan personil yang senantiasa tidak pernah dicukupi. Menurut Prof. Dr. Awaloedin Djamin, ratio Polisi dengan penduduk sudah jauh di bawah ratio yang disarankan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kalau PBB menyarankan standar ratio Polisi dengan masyarakat idealnya berbanding antara 1 : 500, maka ratio Polri tidak bisa mencapai standar tersebut karena sangat terbatasnya personil. Berdasarkan data yang ada ratio Polri dengan penduduk tersebut telah

melebihinya, yaitu antara 1 : 1200 di daerah perkotaan dan sampai dengan 1 : 5000 di daerah pedesaan. Keadaan ini menurutnya sudah tidak memungkinkan bagi Polri untuk bertugas sesuai dengan perhitungan normal lagi dan mengakibatkan sulitnya melaksanakan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Ketiga, profesionalisme Polri dikaburkan, dalam arti kesempatan pengembangan kemampuan teknik khas kepolisian tidak diberikan sepenuhnya. Sejak berintegrasi dalam ABRI, segala ketentuan Angkatan Perang diberlakukan bagi Polri mulai dari doktrin sampai dengan pola pembinaan dan operasionalnya, seperti : berlakunya doktrin Catur Dharma Eka Karma (Cadek) yang lebih dominan daripada doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja (TTKR); berlakunya hukum militer bagi Polri yang bukan militer, berlakunya sistem pendidikan militer, dan lain-lain. Khusus mengenai sistem pendidikan yang melandasi adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, Prof. Awaloedin telah menggambarkan kemerosotan yang tajam akibat sistem pendidikan Polri yang banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan militer. Dalam hal ini beliau memberikan contoh mengenai pendidikan Polri di tingkat agen, bahwa selama bertahun-tahun waktu pendidikan Tamtama Polri disamakan dengan Angkatan Darat, yaitu selama 4 bulan, sedangkan semenjak zaman Hindia Belanda pendidikan Tamtama (agen Polisi) tidak pernah kurang dari 9 bulan sampai 1 tahun.

Dengan struktur yang mapan, instrumen yang lengkap, dan kultur yang telah bisa dirasakan perubahannya sesuai dengan tumbuh dan berkembangnya rasa percaya diri Polri akan kemampuannya mengemban misi dan visinya. Sedangkan tiwikrama Polri akan mampu dilakukan manakala Polri sudah mampu "merebut hati rakyat", yaitu ketika Polri telah mampu memenuhi harapan masyarakat akan kemampuannya menegakkan supremasi hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman, memberikan pelayanan yang tulus dan tanpa pamrih, dan yang paling penting Polri mampu memberikan bimbingan yang baik kepada masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat paham akan pentingnya mem"polisi"i dirinya sendiri

sebagai pencerminan bentuk partisipasinya kepada tugas-tugas Polri. Situasi kondusif yang sedemikian akan merupakan kekuatan Polri dalam setiap menghadapi permasalahan bangsa baik dalam skala kecil maupun besar. Segala bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap tugas-tugas Polri akan merupakan power tersendiri dalam menghadapi setiap permasalahan Polri yang notabene juga merupakan permasalahan bangsa. Dan inilah makna tiwikrama Polri, yaitu kemampuan Polri dalam memberdayakan segenap potensi yang ada baik intern maupun ekstern untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut aspek Kamdagri seperti yang tengah terjadi sekarang ini. ■



KEPALA KEPOLISIAN RESORT GROBOGAN
Drs. BAMBANG RUDI PRATIKNYO, S.H., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI
NRP 62090730
Jl. Bhayangkara No. 9 Purwodadi 58111

MENGUCAPKAN SELAMAT:

**HARI RAYA
Idul Fitri 1422 H,
HARI NATAL 2001,
DAN TAHUN BARU
2002**